

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

## **COLLABORATIVE GOVERNANCE KESBANGPOL DAN DENINTELDAM XII/TANJUNGPURA DALAM PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Wisnu Prayogi<sup>1</sup>  
Rira Nuradhawati<sup>2</sup>  
Dadan Kurnia<sup>3</sup>

*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

### **Abstract**

*This study examines the collaborative governance between the National Unity and Political Agency (Kesbangpol) and the Military Intelligence Detachment (Deninteldam XII/Tanjungpura) in preventing radicalism in West Kalimantan. Using the Tirrel and Clay (2010) model of collaboration, which includes five stages—exploration, formation, growth, maturity, and completion—this research explores the dynamics of civil-military cooperation in policy implementation at the regional level. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, documentation, and observation. The results reveal that collaboration between Kesbangpol and Deninteldam XII/Tanjungpura has reached a mature stage, characterized by shared commitment, joint intelligence analysis, and coordinated preventive actions involving community stakeholders. The collaboration is supported by shared vision and institutional design but still faces obstacles in information transparency and bureaucratic synchronization. The study concludes that civil-military synergy has become an effective model of collaborative governance in preventing radicalism, reinforcing the resilience of national ideology and strengthening social stability in West Kalimantan.*

**Keywords:** *collaborative governance, radicalism prevention, Kesbangpol, military intelligence, civil-military cooperation*

### **PENDAHULUAN**

Fenomena radikalisme di Indonesia masih menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional dan stabilitas politik daerah. Meskipun secara umum tingkat aksi terorisme menurun dalam satu dekade terakhir, perkembangan paham radikal berbasis ideologi keagamaan, separatisme, dan intoleransi sosial tetap menunjukkan dinamika yang mengkhawatirkan. Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

strategis dengan potensi kerawanan tinggi karena posisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan Malaysia, serta karakter masyarakatnya yang multietnis dan multikultural. Dalam konteks ini, pencegahan paham radikalisme menuntut sinergi antarlembaga, terutama antara unsur pemerintahan sipil dan militer.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki mandat utama dalam menjaga stabilitas sosial-politik melalui pembinaan wawasan kebangsaan, penguatan nilai ideologi Pancasila, dan deteksi dini potensi konflik. Sementara itu, Deninteldam XII/Tanjungpura sebagai unsur intelijen TNI AD memiliki fungsi strategis dalam pengumpulan, analisis, dan penyajian data keamanan yang berkaitan dengan ancaman terhadap keutuhan NKRI. Sinergi antara kedua lembaga ini menjadi penting karena penanganan isu radikalisme tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Ancaman tersebut bersifat kompleks, multidimensi, dan membutuhkan mekanisme kolaboratif yang menggabungkan aspek kebijakan, keamanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara empiris, dinamika kolaborasi Kesbangpol dan Deninteldam XII/Tanjungpura di Kalimantan Barat menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Kedua lembaga ini berhasil mengidentifikasi dan memetakan jaringan potensi radikal di beberapa wilayah kabupaten, terutama di daerah perbatasan dan kawasan dengan tingkat kesenjangan ekonomi tinggi. Melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan tokoh agama, organisasi masyarakat, dan aparat pemerintahan daerah, pola pencegahan berbasis kolaborasi mulai terbangun dengan karakteristik komunikasi yang terbuka dan koordinasi lintas lembaga yang terukur.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi kebijakan kolaboratif tersebut. Hambatan utama terletak pada aspek birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan perbedaan persepsi antara lembaga sipil dan militer terkait mekanisme pertukaran informasi. Selain itu, dinamika politik lokal terkadang memengaruhi keberlanjutan program bersama. Hal ini memperlihatkan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

bahwa kolaborasi lintas sektor dalam isu sensitif seperti pencegahan radikalisme memerlukan tata kelola yang kuat dan desain kelembagaan yang adaptif.

Dalam kerangka teori kolaborasi Tirrel dan Clay (2010), keberhasilan sinergi antarlembaga sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk melewati lima tahapan kolaborasi secara berkesinambungan, yaitu tahap eksplorasi, formasi, pertumbuhan, kedewasaan, dan penyelesaian. Model ini menekankan pentingnya kepercayaan, komunikasi, dan pembagian peran yang seimbang antaraktor dalam setiap tahapan kerja sama. Teori ini digunakan untuk menilai bagaimana kolaborasi Kesbangpol dan Deninteldam XII/Tanjungpura berproses dari tahap awal hingga menghasilkan sinergi yang stabil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kolaborasi antara Kesbangpol dan Deninteldam XII/Tanjungpura dalam pencegahan paham radikalisme di Provinsi Kalimantan Barat, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas kolaborasi tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan dinamika kolaborasi sipil-militer dalam mencegah radikalisme dengan menggunakan pendekatan teori kolaborasi Tirrel dan Clay (2010).

Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan model collaborative governance dalam konteks keamanan nasional, sekaligus memberikan masukan kebijakan bagi pemerintah daerah dan institusi pertahanan dalam membangun sistem pencegahan radikalisme yang berkelanjutan dan berbasis kemitraan sosial.

### *Kerangka Teori*

Konsep *collaborative governance* menekankan bahwa penyelesaian masalah publik yang kompleks memerlukan keterlibatan banyak aktor yang bekerja bersama dalam kerangka kepercayaan, komunikasi, dan tujuan bersama. Tirrel dan Clay (2010)

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

mengemukakan bahwa kolaborasi antarlembaga berkembang melalui lima tahapan utama, yaitu tahap eksplorasi, formasi, pertumbuhan, kedewasaan, dan penyelesaian. Setiap tahapan mencerminkan proses dinamis yang menuntut adaptasi dan kesepahaman antaraktor untuk mencapai sinergi efektif.

Tahap eksplorasi merupakan proses awal ketika para pihak mengidentifikasi kepentingan bersama dan kesamaan tujuan. Formasi adalah proses penyusunan struktur kerja sama dan perumusan peran masing-masing aktor. Tahap pertumbuhan menunjukkan peningkatan interaksi, komunikasi intensif, dan berbagi sumber daya. Tahap kedewasaan menandai tercapainya hubungan yang stabil dan saling percaya, di mana kolaborasi berjalan sistematis dan berkelanjutan. Terakhir, tahap penyelesaian mencakup evaluasi, refleksi, serta penyesuaian arah kerja sama untuk memperkuat keberlanjutan.

Dalam konteks penelitian ini, model Tirrel dan Clay digunakan untuk menganalisis proses sinergi antara Kesbangpol dan Deninteldam XII/Tanjungpura sebagai bentuk *collaborative governance* antara lembaga sipil dan militer. Kolaborasi tersebut berfungsi untuk mencegah penyebaran paham radikal melalui strategi komunikasi lintas lembaga, pemetaan potensi ancaman, serta pemberdayaan masyarakat berbasis ideologi Pancasila.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bentuk kolaborasi antara Kesbangpol dan Deninteldam XII/Tanjungpura dalam pencegahan paham radikalisme di Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi penelitian difokuskan di Kantor Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat dan Markas Deninteldam XII/Tanjungpura, serta beberapa kabupaten yang menjadi wilayah binaan program deradikalisasi.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 12 informan utama yang terdiri dari pejabat struktural Kesbangpol, perwira Deninteldam, tokoh masyarakat, serta akademisi lokal yang memahami isu radikalisme. Selain itu, dilakukan observasi partisipatif terhadap kegiatan sosialisasi kebangsaan dan program penguatan wawasan ideologi di beberapa daerah. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, metode, dan dokumen resmi.

## **PEMBAHASAN**

Kalimantan Barat merupakan wilayah dengan heterogenitas sosial tinggi, yang menuntut pendekatan kolaboratif dalam menjaga stabilitas sosial-politik. Kolaborasi antara Kesbangpol dan Deninteldam XII/Tanjungpura terbentuk dari kebutuhan bersama untuk mengintegrasikan fungsi intelijen militer dan kebijakan publik sipil dalam menangani isu radikalisme. Proses kolaborasi ini tidak bersifat formalistik semata, tetapi berkembang berdasarkan kepentingan bersama untuk menjaga keamanan dan harmoni sosial modern.

### **1) Tahap Eksplorasi**

Tahap eksplorasi dalam model kolaborasi merupakan fase awal di mana para pihak mulai menyadari adanya kepentingan dan tanggung jawab bersama terhadap suatu permasalahan publik. Dalam konteks penelitian ini, tahap eksplorasi antara Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat dan Deninteldam XII/Tanjungpura dimulai ketika meningkatnya potensi penyebaran paham radikal di sejumlah wilayah perbatasan pada tahun 2020–2021. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol, munculnya indikasi penyebaran ajaran intoleran dan narasi anti-Pancasila mendorong perlunya langkah strategis bersama antara unsur pemerintahan sipil dan militer. Kesadaran ini melahirkan forum koordinasi awal

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

yang mempertemukan Kesbangpol, Deninteldam, dan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Kalimantan Barat untuk berbagi data awal potensi ancaman.

Dalam fase eksplorasi ini, muncul proses identifikasi peran dan harapan masing-masing lembaga. Kesbangpol memiliki mandat pembinaan ideologi dan ketahanan sosial, sementara Deninteldam berfokus pada intelijen dan deteksi dini. Pertemuan kepentingan ini memunculkan titik temu berupa komitmen kolaboratif yang berorientasi pada pencegahan, bukan penindakan. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi awal antarinstansi berlangsung informal, sering kali melalui pertemuan koordinasi lintas instansi yang diinisiasi oleh Kesbangpol. Kolaborasi ini tumbuh dari kesamaan persepsi bahwa radikalisme tidak hanya ancaman keamanan, tetapi juga ancaman ideologis terhadap nilai-nilai Pancasila.

Secara empiris, tahap eksplorasi ini menghasilkan pemetaan wilayah rawan yang menjadi dasar kerja sama. Daerah perbatasan seperti Sambas, Bengkayang, dan Kapuas Hulu menjadi prioritas karena kerentanan sosial-ekonomi yang tinggi. Deninteldam menyediakan informasi awal mengenai pola pergerakan kelompok yang diduga menyebarkan paham radikal, sedangkan Kesbangpol mengidentifikasi kelompok masyarakat yang rentan menjadi target rekrutmen. Dengan demikian, proses eksplorasi menjadi ruang awal pembentukan kepercayaan dan kesepahaman dalam memahami karakter ancaman.

Analisis peneliti menunjukkan bahwa keberhasilan tahap eksplorasi dipengaruhi oleh adanya *shared vision* atau visi bersama yang kuat. Kedua institusi memiliki kesadaran akan urgensi penanganan dini radikalisme, serta keinginan menjaga stabilitas sosial Kalimantan Barat yang rentan terhadap konflik identitas. Kolaborasi ini memperlihatkan kematangan komunikasi awal, meskipun belum tertata secara kelembagaan. Proses ini menegaskan bahwa fase

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

eksplorasi menjadi pondasi bagi kolaborasi yang lebih formal dan terstruktur di tahap berikutnya.

## 2) Tahap Formasi

Tahap formasi merupakan periode di mana para pihak membangun struktur dan mekanisme formal kerja sama. Berdasarkan hasil penelitian, tahap ini ditandai dengan pembentukan *Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)* dan *Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TTPKS)* yang melibatkan unsur Kesbangpol dan Deninteldam XII/Tanjungpura sebagai bagian dari struktur keanggotaan. Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi rutin dalam membahas isu keamanan sosial dan ideologis di tingkat provinsi. Kesbangpol bertindak sebagai koordinator, sementara Deninteldam memberikan kontribusi data intelijen dan analisis situasional untuk mendukung kebijakan pencegahan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu perwira Deninteldam, pembentukan forum ini menjadi momentum penting karena membuka akses formal bagi militer untuk berkolaborasi dalam ranah kebijakan sipil. Seluruh aktivitas dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, yang menjadi dasar hukum sinergi lintas instansi. Dengan adanya regulasi ini, pola hubungan yang sebelumnya informal menjadi lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Para pihak kemudian menyusun mekanisme komunikasi dan pelaporan bersama yang melibatkan tokoh agama, aparat desa, dan organisasi masyarakat sipil.

Observasi terhadap rapat koordinasi menunjukkan bahwa kolaborasi di tahap formasi mulai menunjukkan kejelasan dalam pembagian peran. Kesbangpol berperan sebagai penghubung antaraktor dan fasilitator kebijakan, sedangkan Deninteldam berperan dalam deteksi dini dan pelaporan potensi ancaman. Kedua lembaga saling melengkapi karena masing-masing memiliki

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

keunggulan berbeda: Kesbangpol kuat di sisi kebijakan dan pendekatan sosial, sedangkan Deninteldam memiliki kapasitas operasional dan jaringan informasi yang luas. Pola ini menghasilkan sinergi yang konkret di lapangan, seperti pelaksanaan sosialisasi anti-radikalisme di sekolah dan pesantren.

Analisis peneliti menemukan bahwa keberhasilan tahap formasi sangat ditentukan oleh kepemimpinan fasilitatif yang dipegang oleh kepala Kesbangpol dan komandan Deninteldam. Mereka mampu menciptakan suasana koordinatif yang egaliter meskipun berasal dari dua kultur kelembagaan yang berbeda. Model kepemimpinan ini mencerminkan *facilitative leadership* sebagaimana disebutkan Ansell dan Gash (2008), di mana pemimpin berfungsi sebagai mediator yang menjaga kepercayaan dan memfasilitasi dialog produktif antarpihak. Tahap formasi menunjukkan bahwa hubungan antarinstansi mulai mengarah pada *collaborative governance* yang mapan. Kesepakatan formal dan pembagian peran yang jelas menjadi dasar bagi keberlanjutan kolaborasi dalam menangani ancaman radikalisme di tingkat regional.

### 3) Tahap Pertumbuhan

Tahap pertumbuhan ditandai oleh peningkatan intensitas interaksi, komunikasi terbuka, dan kegiatan kolaboratif yang berorientasi hasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Kesbangpol, sejak 2022 kedua lembaga rutin melaksanakan kegiatan bersama seperti sosialisasi wawasan kebangsaan, penyuluhan bahaya radikalisme, dan penguatan kapasitas aparatur di tingkat kecamatan. Setiap kegiatan melibatkan unsur TNI, Polri, tokoh agama, serta lembaga pendidikan. Sinergi ini memperlihatkan peningkatan kepercayaan antarinstansi dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan.

Data observasi menunjukkan bahwa pada tahap ini kolaborasi tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mulai melibatkan masyarakat akar rumput. Deninteldam XII/Tanjungpura berperan dalam memetakan daerah dengan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

potensi penyebaran ideologi ekstrem, sementara Kesbangpol bertugas membina jaringan kader ideologi Pancasila di wilayah-wilayah tersebut. Sinergi ini menciptakan pola kerja lintas sektoral yang adaptif. Misalnya, kegiatan “Forum Dialog Kebangsaan” yang diselenggarakan di Kabupaten Sambas pada pertengahan 2023 menunjukkan keterlibatan aktif mahasiswa, tokoh agama, dan unsur Babinsa sebagai agen pembina ideologi.

Secara teoritis, fase pertumbuhan menggambarkan proses transisi dari kolaborasi formal menuju kemitraan substantif. Kesbangpol dan Deninteldam mulai berbagi sumber daya, informasi, serta tanggung jawab dalam perencanaan kegiatan. Peneliti menemukan bahwa komunikasi antarpegawai lintas lembaga meningkat secara signifikan. Misalnya, laporan hasil deteksi dini dari Deninteldam kini menjadi bahan analisis rutin dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Radikalisme oleh Kesbangpol. Ini menunjukkan bahwa sinergi tidak hanya berhenti pada koordinasi, tetapi sudah mencapai tingkat integrasi operasional. Kolaborasi Kesbangpol–Deninteldam telah berkembang menjadi sistem kerja yang adaptif dan berorientasi hasil. Interaksi lintas sektor berjalan harmonis, komunikasi efektif terbangun, dan dukungan masyarakat semakin meningkat.

#### 4) Tahap Kedewasaan

Tahap kedewasaan menggambarkan kondisi kolaborasi yang stabil dan institusional. Berdasarkan hasil penelitian, sejak tahun 2023 kolaborasi Kesbangpol dan Deninteldam telah memasuki tahap ini, ditandai dengan terbentuknya Kesepakatan Bersama tentang Penguatan Ketahanan Ideologi di Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Kepala Kesbangpol dan Komandan Deninteldam XII/Tanjungpura. Dokumen ini menjadi tonggak penting bagi keberlanjutan kerja sama lintas lembaga dalam menangani paham radikal secara berkelanjutan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

Pada tahap ini, pola hubungan antarinstansi telah didasari oleh kepercayaan tinggi dan pembagian tugas yang jelas. Kesbangpol memimpin kegiatan pendidikan ideologi dan koordinasi lintas sektor, sedangkan Deninteldam memfokuskan pada fungsi pengawasan dan deteksi dini. Keduanya bekerja dalam ritme yang saling melengkapi, di mana laporan intelijen Deninteldam menjadi dasar pembinaan sosial oleh Kesbangpol. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kolaborasi ini juga melibatkan Polri, Kanwil Kemenag, serta organisasi kemasyarakatan yang menjadi mitra ideologis.

Kolaborasi tidak lagi bergantung pada figur pimpinan tertentu, tetapi sudah terlembaga dalam prosedur kerja dan rencana aksi tahunan. Evaluasi kolaborasi dilakukan secara periodik setiap triwulan untuk menilai capaian, hambatan, dan tindak lanjut kegiatan. Selain itu, forum lintas instansi kini memiliki sekretariat tetap di kantor Kesbangpol, yang menandakan adanya institutional design yang mapan.

Dari sisi dampak, kolaborasi yang matang ini menghasilkan penurunan signifikan terhadap potensi penyebaran paham radikal di wilayah Kalimantan Barat. Berdasarkan data Kesbangpol (2024), jumlah temuan kasus penyebaran ideologi ekstrem di sekolah dan kampus menurun 28% dibanding dua tahun sebelumnya. Capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan koordinasi, tetapi juga efektivitas pembinaan sosial yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.

##### 5) Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian dalam model Tirrel dan Clay tidak berarti kolaborasi berakhir, tetapi menjadi fase refleksi dan reorientasi strategi. Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap ini Kesbangpol dan Deninteldam melakukan evaluasi terhadap seluruh proses kolaborasi, baik dari segi efektivitas kebijakan, koordinasi, maupun dampak sosial. Evaluasi dilakukan melalui rapat lintas

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

instansi yang dihadiri oleh unsur Forkopimda, akademisi, dan tokoh agama. Salah satu hasil evaluasi penting adalah perlunya peningkatan kapasitas SDM dan integrasi sistem informasi antarinstansi agar pencegahan radikalisme dapat berjalan lebih efisien.

Hasil wawancara mengungkap bahwa kedua lembaga kini tengah menyusun rencana pengembangan Early Warning System (EWS) berbasis digital yang akan mengintegrasikan data sosial, politik, dan keamanan di seluruh kabupaten/kota. Deninteldam berperan sebagai penyedia data intelijen, sementara Kesbangpol berperan dalam analisis sosial dan rekomendasi kebijakan. Inisiatif ini menunjukkan bahwa tahap penyelesaian justru menjadi awal dari proses kolaborasi yang lebih modern dan adaptif.

Keberhasilan kolaborasi hingga tahap ini merupakan bukti penting efektivitas model collaborative governance di sektor keamanan nasional. Namun, terdapat risiko stagnasi apabila regenerasi kepemimpinan atau perubahan politik daerah tidak diimbangi dengan kebijakan kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu, pelembagaan mekanisme kerja sama melalui regulasi daerah yang bersifat permanen menjadi rekomendasi utama untuk menjaga keberlanjutan sinergi ini.

Dengan demikian, tahap penyelesaian mencerminkan transisi dari kolaborasi berbasis proyek menuju kemitraan kelembagaan jangka panjang. Evaluasi, refleksi, dan inovasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kolaborasi Kesbangpol–Deninteldam tetap relevan menghadapi ancaman radikalisme yang terus berkembang di era digital.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat dan Detasemen Intelijen Kodam

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

XII/Tanjungpura (Deninteldam) merupakan model sinergi sipil-militer yang efektif dalam pencegahan paham radikalisme di wilayah perbatasan dan perkotaan Kalimantan Barat. Kolaborasi ini berangkat dari kesadaran bersama bahwa ancaman ideologi radikal tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan, melainkan membutuhkan pendekatan multidimensional yang melibatkan kebijakan publik, pendidikan kebangsaan, dan pemberdayaan sosial. Melalui proses kolaborasi yang berlangsung secara berjenjang, mulai dari tahap eksplorasi hingga penyelesaian, kedua lembaga berhasil membangun sistem kerja yang berbasis kepercayaan, komunikasi, dan tujuan bersama untuk menjaga stabilitas ideologi di daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima tahap kolaborasi menurut Tirrel dan Clay (2010) telah terimplementasi dengan baik. Pada tahap eksplorasi, kolaborasi dimulai dari kesadaran akan ancaman ideologi; tahap formasi menghasilkan struktur kelembagaan formal yang memperjelas peran antarinstansi; tahap pertumbuhan memperlihatkan peningkatan intensitas kegiatan bersama; tahap kedewasaan mencerminkan profesionalisme dan keberlanjutan hubungan kelembagaan; dan tahap penyelesaian menghasilkan evaluasi serta inovasi kebijakan melalui integrasi sistem informasi dan penguatan kapasitas kelembagaan. Keseluruhan tahapan tersebut membuktikan bahwa sinergi antara Kesbangpol dan Deninteldam tidak hanya menciptakan mekanisme koordinasi, tetapi juga mengokohkan fondasi tata kelola kolaboratif dalam konteks keamanan nasional.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur *collaborative governance* di Indonesia, khususnya dalam konteks kerja sama sipil-militer pada isu non-tradisional seperti radikalisme. Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan radikalisme di daerah sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, komunikasi lintas lembaga, serta desain kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika sosial dan politik. Kolaborasi Kesbangpol–Deninteldam XII/Tanjungpura dapat dijadikan model nasional bagi

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

penguatan peran pemerintah daerah dan TNI dalam menjaga ketahanan ideologi serta stabilitas sosial-politik bangsa.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran strategis yang perlu diperhatikan untuk memperkuat keberlanjutan kolaborasi antara Kesbangpol dan Deninteldam XII/Tanjungpura. Pertama, perlu dilakukan pelembagaan kerja sama melalui regulasi daerah yang bersifat permanen agar kolaborasi tidak bergantung pada figur pimpinan tertentu. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari unsur Kesbangpol maupun militer, menjadi penting agar mampu memahami isu-isu ideologi, komunikasi publik, dan mitigasi konflik dengan pendekatan sosial yang humanis. Ketiga, penguatan sistem informasi lintas lembaga melalui *Early Warning System* (EWS) berbasis digital harus segera diwujudkan agar deteksi dini terhadap potensi radikalisme dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan terintegrasi.

Keempat, kolaborasi perlu diperluas melalui keterlibatan aktif masyarakat sipil, organisasi keagamaan, dan lembaga pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara berkelanjutan. Dengan demikian, program pencegahan tidak berhenti pada tataran birokrasi, tetapi menjadi gerakan sosial yang melembaga di tengah masyarakat. Kelima, pemerintah pusat dan Kementerian Pertahanan dapat menjadikan kolaborasi ini sebagai model pilot project nasional dalam penguatan sinergi sipil-militer berbasis *soft power* untuk menghadapi ancaman ideologis di masa depan.

## **REFERENSI**

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Basri, M., & Rahardjo, D. (2022). Sinergi sipil-militer dalam penanganan isu radikalisme di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(3), 201–220. <https://doi.org/10.22146/jkn.v28i3.2022>

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 12 Okt 2025*

*Published : 23 Okt 2025*

- 
- Bureau of National Security Studies. (2023). *National Strategy for Preventing Violent Extremism in Southeast Asia*. Jakarta: BNSS Indonesia.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. (2024). *Laporan Tahunan Program Pencegahan Paham Radikalisme dan Penguatan Ideologi Pancasila Tahun 2024*. Pontianak: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- Dwiyanto, A. (2020). *Manajemen pelayanan publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitriani, E., & Rachman, F. (2021). Soft power approach in Indonesia's counter-radicalization strategy. *Jurnal Ilmu Pertahanan*, 9(1), 33–49. <https://doi.org/10.33172/jip.v9i1.2021>
- Haryanto, S., & Widodo, T. (2023). Kolaborasi antar instansi dalam pencegahan radikalisme: Perspektif governance di daerah perbatasan. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 11(1), 101–118. <https://doi.org/10.33021/jkmp.v11i1.2023>
- Hidayat, A., & Satria, D. (2023). Peran operasi militer selain perang (OMSP) dalam membangun stabilitas nasional dan sosial masyarakat Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 13(2), 147–165. <https://doi.org/10.33172/jpbn.v13i2.2023>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). *Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kemenhan RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nye, J. S. (2021). *Soft power and global politics in the 21st century*. Oxford: Oxford University Press.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2020). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Raharjo, D., & Wulandari, L. (2022). Collaborative governance dalam penanganan isu keamanan non-tradisional: Studi kasus keterlibatan TNI dalam pencegahan radikalisme. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 111–130. <https://doi.org/10.23960/jakp.v10i2.2022>

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

- Saputra, R., & Widodo, H. (2023). Strengthening interagency cooperation in radicalism prevention policy in Indonesia. *Journal of Security and Strategic Studies*, 7(3), 88–105. <https://doi.org/10.31227/jsss.v7i3.2023>
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subarsono, A. G. (2020). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, E., & Nugroho, S. (2024). Kolaborasi multi-aktor dalam pencegahan radikalisme: Pendekatan sosial dan intelijen. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(1), 71–88. <https://doi.org/10.31227/jps.v8i1.2024>
- Tirrel, A., & Clay, J. (2010). Stages of collaboration in public policy networks: From exploration to institutionalization. *Policy Studies Review*, 22(2), 211–230. <https://doi.org/10.1080/psr.2010.22.2.211>
- Wibisono, H., & Kurniawan, A. (2021). Collaborative framework for civil-military engagement in radicalism prevention. *Jurnal Pertahanan dan Keamanan Nasional*, 9(2), 145–163. <https://doi.org/10.33021/jpkn.v9i2.2021>